KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

NOMOR SOP	:	W.32.OT.02.02-27
TGL PEMBUATAN	:	03 Februari 2025
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	03 Februari 2025
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, EDISON MANIK NIP. 197802172001121002
NAMA SOP	:	REKONSILIASI LK KANWIL HUKUM KEPULAUAN RIAU

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 Tentang Standar Struktur Biaya; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar .	1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; 2. Memiliki kemampuan pengoperasian aplikasi SAKTI dan MONSAKTI; 3. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 4. Memahami sistem akuntansi.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengajuan permintaan pembayaran melalui surat perintah membayar ganti uang persediaan (GUP); 2. SOP Pengajuaan Permintaan Pembayaran melalui surat perintah membayar langsung (LS) ke rekening pihak ke 3/rekanan; 3. SOP Pengajuan Permintaan pembayaran melalui surat perintah membayar langsung LS ke rekening bendahara pengeluaran	1. Komputer dan printer; 2. Jaringan Internet.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak disusun dengan baik maka pelaporan keuangan tidak tepat waktu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DENGAN KPPN

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KEPALA BAGIAN TU DAN UMUM	OPERATOR GLP	OPERATOR ASET	KPPN	KELENGKAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	OUTPUT	
1	Kepala Bagian TU dan umum memerintahkan untuk melakukan kegiatan rekonsiliasi LK Kanwil Kemenkum dengan KPPN	Mulai				Disposisi	15 menit	Disposisi	
2	Operator GLP dan Operator Aset melakukan Rekonsiliasi Internal					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Operator GLP Menyusun Memo Penyesuaian (apabila ada)					Memo Penyesuaian	30 Menit	Memo Penyesuaian	
4	Operator GLP Melakukan Monitoring pada Aplikasi Monsakti					Monasakti	1 hari	SHR	
5	Operator GLP dan Operator Aset melakukan tutup periode bulan berkenaan					Sakti	5 Menit	SHR	
6	KPPN Menerbitkan SHR				Selesai	Monasakti	1 hari	SHR	